

Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam

Volume 6 Nomor 2, Desember 2022

<http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/nalar>

E-ISSN: 2598-8999, P-ISSN: 2597-9930

Islam dan Politik Identitas: Konflik pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Indonesia

Yusril Fahmi Adam

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
21201022002@student.uin-suka.ac.id

Keywords :

212 Movement;
Islamic Ideology;
Politics of Identity

Abstract

Politics of identity often triggers conflicts to emerge on the surface of Indonesian society. In this case, the 212 movement is a formal object that is considered to be included in politics of identity that uses Islam as the spirit of its movement. This article aims to analyze the politics of identity of the 212 movements through a historical frame. This study uses historical methods, as well as political approaches as tools in analyzing historical events. With the methods, approaches, and theories used, this research will then not only work in a narrative descriptive but rather in an analytical descriptive, so that this article can produce an authoritative work on social history in the contemporary era. The result of this study is that the 212 movements began when there was blasphemy committed by Basuki Tjahaja Purnama (Abok) during a speech in the Kepulauan Seribu. In its development, the 212 movements changed their orientation to a politics of identity movement which often caused conflicts during religious and socio-political life. During various conflicts that have arisen, the government together with moderate Islamic organizations such as NU and Muhammadiyah must be role models to maintain the unity of the Indonesian nation.

Kata Kunci :

Gerakan 212;
Ideologi Islam;
Politik Identitas

Abstrak

Politik identitas seringkali memicu konflik menjadi timbul ke dalam permukaan masyarakat di Indonesia. Dalam hal ini, gerakan 212 merupakan objek formal yang dianggap termasuk dalam politik identitas yang menggunakan Islam sebagai semangat pergerakannya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis politik identitas gerakan 212 melalui bingkai sejarah. Penelitian ini menggunakan metode sejarah, serta pendekatan politik sebagai alat bantu dalam menganalisis peristiwa sejarah. Dengan metode, pendekatan dan teori yang digunakan, penelitian ini kemudian tidak hanya akan bekerja secara naratif-deskriptif, melainkan lebih kepada analitis-deskriptif, sehingga artikel ini dapat menghasilkan karya sejarah sosial yang otoritatif di era kontemporer. Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa gerakan 212 bermula pada saat terdapatnya penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Abok) pada saat pidato di Kepulauan Seribu. Dalam perkembangannya, gerakan 212 berubah orientasi menjadi gerakan politik identitas yang tidak jarang menimbulkan konflik di tengah-tengah kehidupan beragama dan sosial-politik. Di tengah berbagai konflik yang muncul, pemerintah bersama dengan organisasi Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah harus menjadi role model demi menjaga persatuan bangsa Indonesia.

Article History :

Received : 8 – 7 – 2022

Accepted : 7 – 9 - 2022

PENDAHULUAN

Politik Islam merupakan suatu hal yang menarik dikaji para sarjana baik dari kalangan sarjana Muslim, maupun non-Muslim, baik dari perspektif klasik, masa pertengahan, modern, maupun kontemporer. Dengan kata lain kajian terkait politik Islam

selalu memberikan daya tarik yang kuat untuk menjadikannya sebagai diskursus dalam dunia Islam (Jabali 2010). Adanya keragaman perspektif perihal politik Islam disebabkan karena terdapatnya berbagai respon dari umat Islam itu sendiri yang menjabarkan makna politik dan Islam. Perlu menjadi catatan bahwa, “Islam Politik” dan “Politik Islam” merupakan dua hal yang berbeda. Islam politik merupakan ajaran yang mengungkapkan bahwa umat Islam seyogianya untuk terlibat di dalam aktifitas politik di sebuah negara, sedangkan politik Islam merupakan sebuah struktur kekuasaan politis yang dijalankan berdasarkan syariat Islam (Suhelmi 2014).

Diskursus mengenai politik Islam di Indonesia sebenarnya telah dilakukan oleh para *founding fathers* (pendiri bangsa) pasca kemerdekaan. Diskursus tersebut terjadi ketika membahas tentang ideologi yang tepat untuk diterapkan di negara majemuk dan memiliki berbagai macam suku dan agama. Desakan untuk pendirian negara Indonesia secara syariat Islam pada akhirnya mencapai kesepakatannya dengan menerapkan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan ideologi negara yang dianggap dapat menaungi berbagai perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia (Latif 2018). Meskipun telah mencapai kata final dalam menggunakan ideologi Pancasila, upaya untuk menerapkan Negara Islam Indonesia tetap ada, sehingga menuai polemik yang berkelanjutan dan menciptakan perdebatan yang menegasikan antara Islam dengan politik (Nugroho 2013). Perdebatan yang terjadi di dalam pemerintahan pasca kemerdekaan tersebut terdapat pada kelompok Islam seperti Natsir dan Isa Anshary, serta kelompok Nasionalis-Sekular seperti yang diwakili oleh Sukarno dan Sutomo (Siregar 2021). Pergulatan ideologi yang terjadi pada pasca kemerdekaan di Indonesia tersebut, menghasilkan bahwa kelompok Islam mengalami keterpinggiran, bahkan dalam fakta historis bahwa partai Islam seperti Masyumi dibubarkan oleh Sukarno pada tahun 1960, dan rezim orde lama terlihat sangat solid antara Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) (Fauzan 2019).

Lebih jauh, ketika awal era orde baru, Islam seperti menjadi ancaman yang besar bagi negara. Hal tersebut dapat dibuktikan ketika orde baru diperkuat oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di dalam birokrasi pemerintahan, yang mana terdapat perasaan anti partai di kalangan angkatan darat (Gaffar 1993). Kekuatan Suharto yang didukung penuh oleh ABRI tersebut kemudian membatasi ruang gerak politik Islam yang coba digaungkan kembali oleh beberapa mantan kader Masyumi, seperti Prawoto Mangkusasmito yang berusaha untuk memulihkan kekuatan Partai Masyumi, namun tidak diizinkan oleh Presiden (Putra 2008). Dalam peristiwa lain, pada tahun 1968 Partai Muslimin Indonesia (PMI) ingin mengadakan muktamar perdana di Malang. Saat itu, Muhammad Roem terpilih berdasarkan suara terbanyak dari internal partai. Namun yang terjadi adalah, angkatan darat merasa keberatan jika PMI dipimpin oleh kader mantan Masyumi yang menurut pemerintah orde baru Masyumi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila (Kamsi 2013). Berdasarkan hal tersebut, pemerintah orde baru tidak ingin kekuatan politik Islam muncul kembali seperti yang dilakukan pada orde lama (Renhoard 2019). Sehingga, meminjam istilah Tiar Anwar Bachtiar, jika masa orde lama umat Islam melakukan aktifitas dakwahnya di dalam berpolitik. Namun jika pada era orde baru, umat Islam melakukan aktifitas politiknya di dalam berdakwah (Bachtiar 2018).

Realitas terkait adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh umat Islam dalam merespon marginalisasi politik setidaknya menjadi bagian dari upaya untuk menunjukkan eksistensinya dalam mengkonfrontasi yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Berbagai upaya yang dihasilkan umat Islam, adalah dengan mendirikan gerakan-gerakan yang kemudian menghasilkan politik identitas di dalamnya (Garadian 2017). Politik identitas yang dimaksud adalah politik yang menggunakan identitas Islam dalam semangat pergerakannya. Pada dasarnya, politik identitas merupakan politik yang menggunakan

identitas tertentu dan mengukur sebuah permasalahan melalui perbedaan-perbedaan yang diasumsikan melalui fisik atau tubuh, bahasa, primordialisme, pertentangan kepercayaan, dan agama. Sehingga, politik identitas ini kemudian hadir untuk mengakomodir sesuatu yang dianggap termarginalkan, dalam hal ini adalah Islam (Ma'arif 2012). Oleh karena itu, terdapat upaya-upaya dalam umat Islam dalam mendirikan sebuah gerakan yang secara pragmatis tergolong dalam politik identitas, misalnya adalah Front Anti Komunis (FAK), gerakan Daarul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), dan di era kontemporer terdapat gerakan 212 (Bachtiar 2021).

Berdasarkan realitas politik Identitas terakhir di Indonesia, yakni gerakan 212, merupakan objek formal dalam kajian ini. Pemilihan gerakan 212 sebagai objek formal di dalam penelitian ini disebabkan gerakan 212 mempunyai dampak yang besar bagi aspek sosio-keagamaan bahkan politik di Indonesia. Sebagai gerakan keagamaan di era kontemporer, gerakan 212 dinilai memiliki nuansa yang bermuatan politis. Asumsi tersebut dapat dibuktikan dengan aktifitas yang terdapat pada Aksi Bela Islam yang terjadi pada 2 Desember 2016, sehingga disebut sebagai gerakan 212. Argumentasi lainnya adalah gerakan 212 ini memiliki kontinuitas setelah Aksi Bela Islam yang terjadi pada 2 Desember 2016. Gerakan 212 merupakan gerakan yang timbul sebagai wujud protes karena Gubernur DKI Jakarta saat itu yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai melakukan penistaan agama. Setelah tanggal 2 Desember 2016, maka gerakan 212 tersebut menjadi gerakan politik identitas untuk mendukung pasangan calon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Selain itu, gerakan 212 ini kemudian setidaknya tetap mewarnai pemilihan umum 2019, baik pemilihan presiden maupun legislatif. Politik identitas yang dilakukan oleh gerakan 212 ini penulis anggap memiliki dampak yang signifikan di dalam perpolitikan di Indonesia karena tidak jarang pula menimbulkan konflik di permukaan masyarakat, sehingga diskursus historis mengenai gerakan 212 ini dinilai penting sebagai wawasan akan ancaman pluralisme dan refleksi ke depan tentang pentingnya nilai-nilai moderat (Maulana 2020).

Kajian terkait gerakan 212 dalam lima tahun terakhir sudah dilakukan dengan berbagai perspektif. Ahmad Najib Burhani (2016) dalam kajiannya yang berjudul Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan menemukan adanya polarisasi yang terjadi dalam internal umat Islam seperti NU dan Muhammadiyah yang terlibat dalam aksi 212. Begitu juga Burhanudin Rabbani dan Nila Sastrawati (2021) yang menemukan adanya berbagai dampak dari gerakan 212, misalnya adalah dampak ekonomi terciptanya Koperasi 212 atau 212 Mart. Dalam dampak sosial terdapat alumni 212 yang terhubung dalam sebuah organisasi Persaudaraan Alumni 212 (PA 212). Aspek politik juga memberikan dampak, yakni semangat partisipasi aktif dari umat Islam dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 dan juga Pemilihan Presiden tahun 2019. Kajian lainnya dilakukan oleh Jubba, Baharuddin, Pabajjah, dan Qodir (2020) yang menemukan masifnya informasi gerakan 212 dan politik praktis dalam media internet. Sejalan dengan temuan itu Pradipta dkk (2018) dalam kajiannya juga menemukan adanya penyebaran informasi yang signifikan pada media massa BBC terkait gerakan 212. Dalam perspektif kajian tafsir, Miati Widianingsih (2018) dalam kajiannya yang berjudul Agama dan Sains: Telaah Kritis Tafsir Ayat Berbasis Angka dalam Gerakan 212 menemukakan tafsir ayat berbasis angka di dalam Al-Qur'an berdasarkan gerakan 212.

Kajian pustaka yang terdapat pada lima tahun terakhir di atas, menunjukkan bahwa pembahasan seputar gerakan 212 mendapatkan perhatian besar sebagai analisis fenomena sosio-keagamaan bahkan politik di Indonesia di era kontemporer. Oleh karena itu, sampailah penelitian ini pada signifikansinya, yakni menjadikan gerakan 212 sebagai objek formal yang dianalisis melalui bingkai sejarah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis konflik dalam identitas politik gerakan 212 yang dianggap belum terekam dalam historiografi Islam di Indonesia. Berbagai penelitian sebelumnya yang menjadikan gerakan 212 sebagai objek analisis dikaji berdasarkan sudut pandang yang beragam, seperti aspek politik, sosiologi, komunikasi, bahkan media. Namun belum ditemukan kajian tentang 212 yang berdasarkan metode sejarah. Sehingga dalam penelitian ini akan disajikan dalam perspektif sejarah dan tidak hanya akan dijelaskan secara deskriptif mengenai pengalaman historis politik identitas yang terdapat di Indonesia, melainkan juga mengantarkan kepada analisis gerakan 212 di dalam keterlibatannya pada aspek politik yang menggunakan identitas Islam (Kuntowijoyo 2008).

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode historis melalui empat tahap. *Pertama*, adalah pengumpulan data atau sumber-sumber (heuristik). Pada tahap ini, pengumpulan data dilakukan dengan mencari buku-buku, arsip, dokumen, majalah, dan koran-koran yang menjadi sumber primer dalam kajian ini. Selain itu, sumber sekunder berupa buku dan jurnal dalam kajian terdahulu juga digunakan sebagai bahan peninjauan di dalam penelitian ini. *Kedua*, adalah kritik sumber. Sumber-sumber atau data yang telah terkumpul kemudian dikritik agar diketahui keabsahannya, sehingga sumber-sumber tersebut dinilai layak untuk digunakan sebagai analisis di dalam penelitian (Abdurrahman 2019). *Ketiga*, penafsiran (interpretasi). Pada tahap ini, sumber-sumber yang telah dikritik kemudian ditafsirkan berdasarkan kumulatif bacaan yang terdapat dalam diri penulis. *Keempat*, adalah historiografi. Dalam tahap ini, merupakan tahap penulisan sejarah dengan menggunakan sumber-sumber otoritatif dengan penafsiran yang akurat (Madjid 2014).

Di dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan pendekatan politik. Pendekatan politik dianggap sebagai alat bantu dalam menganalisis peristiwa historis politik identitas gerakan 212, yakni *pertama*, tema yang dikaji dalam penelitian ini adalah menyangkut kepemimpinan atau kekuasaan berdasar faktor-faktor sosial, ekonomi dan kultural. *Kedua*, faktor sosial yang tinggi dalam organisasi, misalnya adalah kalangan elit agama yang berperan dalam mengambil kekuasaan. *Ketiga*, faktor kultural yang mempengaruhi orientasi nilai dan pandangan hidup seseorang. Atas kecenderungan politik, telaah historis dapat dilakukan dengan jalan mengidentifikasi hubungan antar faktor-faktor antar suatu sistem atau komunitas politik. Misalnya, konflik politik dijadikan sasaran penelitian sejarah maka permasalahan serta eksplanasinya dapat dikembalikan kepada faktor-faktor sosial-budaya dan kepentingan ideologi atau nilai tertentu (Budiarjo 2015).

Berdasarkan pendahuluan yang telah disebutkan, artikel ini secara khusus mengkaji gerakan Islam politik pada gerakan 212 yang termasuk dalam politik identitas dan melahirkan konflik pada beberapa peristiwa politik berikutnya. Seperti yang telah disebutkan Tiar Anwar Bahtiar di muka, bahwa ketika masa orde lama merupakan “dakwah dalam politik”, sedangkan masa orde baru dan sesudahnya adalah “politik dalam dakwah”, maka gerakan 212 merupakan gerakan Islam politik, yang berupaya membangun kembali semangat politik Islam yang telah dilakukan tokoh Islam pada masa lalu. Oleh karena itu, diharapkan artikel ini dapat memberikan analisis gerakan 212 yang tergolong kontemporer namun tetap terikat dengan peristiwa historis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Identitas dalam Peristiwa Historis di Indonesia

Sebelum menuju kepada gerakan 212 yang merupakan gerakan sosial-keagamaan yang muncul pada era kontemporer di Indonesia, seyogianya untuk terlebih dahulu memahami proses pembentukan identitas Islam berdasarkan catatan historis yang terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada abad ke-17 dan 18, sebagaimana dalam penelitian Azyumardi Azra (2016), ia menyebutkan bahwa terdapat jaringan keulamaan antara Makkah

dengan daerah-daerah Islam di dunia, termasuk wilayah Nusantara. Jaringan keulamaan tersebut kemudian membangun kesadaran akan pentingnya transmisi keilmuan dari Mekkah sebagai pusat keilmuan Islam dengan Nusantara. Dalam waktu tersebut kemudian muncul komunitas Jawi, yakni penuntut ilmu yang berasal dari Nusantara yang pergi ke Mekkah untuk mempelajari Islam. Berbagai ulama Nusantara tersebut adalah, pada abad ke-17 yaitu Nuruddin al-Raniri (w. 1068/1656), Abdurrauf al-Sinkili (1024-1105/1615-1693), Muhammad Yusuf al-Maqassari (1037-1111/1627-1699) dan abad ke-18 yakni Abdul Shamad al-Falimbangi, Muhammad Arsyad al-Banjari, dan Dawud Abdullah al-Fathani (Hakim 2020).

Dengan terbentuknya jaringan ulama antara Mekkah dengan Nusantara ini, beberapa ulama yang telah menuntut ilmu di Mekkah kemudian kembali ke tanah air dengan tujuan sebagai transmisi keilmuan yang telah didapatkan selama belajar di Mekkah yang merupakan pusat keilmuan Islam di dunia. Selain itu, ulama yang kembali ke wilayah Nusantara berperan dalam membentuk struktur masyarakat dari dalam, sehingga pengaruh ulama menjadi signifikan di dalam tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam sehari-hari. Menurut Jajat Burhanudin, setelah periode jaringan ulama abad ke-17 dan 18, orientasi keilmuan kemudian mengalami pergeseran yang semula Mekkah sebagai pusat pembelajaran Islam, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 muncul Kairo sebagai pusat keilmuan Islam yang mengedepankan pembaruan Islam dan spirit kemodernan (Burhanudin 2012). Dengan munculnya Kairo, kemudian terdapat beberapa ulama yang belajar di sana dan memberikan dampak pemikiran reformisme Islam kepada masyarakat yang pada saat itu disebut sebagai Hindia Belanda. Pengaruh pembaruan Islam dengan spirit kemodernan ini, menurut Laffan (2003), merupakan salah satu awal dari diskursus pembentukan nasionalisme di Indonesia dengan Islam sebagai identitas yang mengakar.

Perjalanan historis pembentukan identitas Islam di Indonesia kemudian berlanjut pada dasawarsa tahun 1920-an, sebagai contoh adalah bagaimana Oemar Said Tjokroaminoto yang menggunakan ideologi Islam sebagai formula politiknya dan pengikat kesatuan bangsa Indonesia. Bahkan, di dalam Kongres Nasional Central Sarekat Islam di Bandung, Tjokroaminoto dengan berani menyatakan tuntutan bangsanya, yakni “Indonesia Merdeka”. Padahal pada saat itu bagi organisasi non-Islam menganggap sangatlah tabu untuk berani menyuarkan isu kemerdekaan seperti itu. Tjokroaminoto menggunakan identitas Islam sebagai spirit berpolitik, bukanlah sebagai gerakan anti terhadap agama lain, bukan juga anti terhadap suku atau ras yang berkuasa, melainkan hanya ingin mencapai kemenangan sejati, yakni melawan kezaliman dan penguasa yang tiranik, serta mencari ridho Allah dalam perjuangan pergerakannya (Suryanegara 1995).

Penggunaan Islam sebagai identitas politik di Indonesia kemudian mengalami perkembangan, terutama periode pasca kemerdekaan. Munculnya gerakan politik yang menggunakan identitas Islam tersebut tidak jarang kemudian memberikan dampak yang signifikan bagi stabilitas sosial-politik Indonesia. Di dalam sejarah, gerakan-gerakan yang menggunakan identitas Islam setidaknya telah direkam oleh sejarawan Muslim modern di dalam historiografi Islam Indonesia. Terdapat beberapa contoh fakta historis yang dapat dipaparkan dalam kajian ini tentang politik identitas yang terdapat di dalam berbagai gerakan yang dibentuk oleh umat Islam. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa, contoh yang disebutkan kemudian merupakan sebuah refleksi historis dan melihat unsur distingtif politik identitas yang terjadi pada masa lalu, sehingga kemudian akan mengantarkan kepada gerakan 212 di era kontemporer saat ini.

Pertama, gerakan DI/TII. Gerakan DI/TII ini merupakan gerakan sosial yang menggunakan Islam sebagai landasan dari perjuangannya. DI/TII merupakan sebuah gerakan yang diprakarsai oleh Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949 (Sanusi 2022). Setelah

diproklamirkannya gerakan DI/TII, Kartosuwiryo kemudian memberikan intruksi kepada seluruh militan dan simpatisan gerakan yang menginginkan Indonesia berdasarkan syariat Islam. Faktor yang menyebabkan berdirinya gerakan DI/TII ini pada mulanya adalah sebagai protes atas penjajahan Belanda yang membelenggu umat Islam di Indonesia (Harianto 2022).

Selain itu, meminjam istilah Mubarak bahwa, gerakan DI/TII ini muncul disebabkan beberapa faktor, yakni tidak dijalankannya syariat Islam secara menyeluruh, melaksanakan *jihad fi sabilillah*, dan melawan kaum kafir. Atas dasar hal tersebut, maka gerakan DI/TII melakukan pergerakannya di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Kartosuwiryo memimpin di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah, Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakkar (Bakar 2018), Aceh dipimpin oleh Daud Beureuh (Muhajir 2016), dan Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hadjar. Gerakan DI/TII ini merupakan gerakan yang berlangsung cukup lama di Indonesia, sehingga pemerintah memberikan perhatian yang lebih untuk menumpas gerakan tersebut. Upaya yang dilakukan DI/TII untuk menjadikan Negara Islam Indonesia pada akhirnya gagal dan pada tahun 1960-an, kekuatan gerakan tersebut dinilai melemah dengan para pemimpin DI/TII yang beberapa telah ditembak mati oleh kekuatan militer Republik Indonesia (Mubarak 2015).

Kedua, gerakan Front Anti Komunis (FAK). Gerakan FAK merupakan gerakan yang didirikan oleh Isa Anshary dan beberapa kader Partai Masyumi yang termasuk dalam kelompok anti-komunis (Madinier 2013). FAK berdiri pada 12 September 1954 di Bandung, Jawa Barat. Gerakan FAK merupakan gerakan sosial-keagamaan yang bertujuan untuk membendung laju komunisme yang dibawa oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Gerakan FAK ini sejatinya bukan merupakan partai politik, melainkan gerakan FAK ini kemudian terlibat dalam fungsi pragmatis dalam perpolitikan di Indonesia, yakni menjadi *underbouw* dari Partai Masyumi di dalam pemilu tahun 1955 (Suara Masjumi 20 September 1954).

Aktifitas daripada gerakan FAK ini merupakan fokus pada medan dakwah, yakni dengan melakukan ceramah, khutbah, menuliskan syariat Islam di dalam buku, majalah, koran, bahkan poster. Hal demikian dilakukan karena tujuan dasar dari FAK adalah ingin menjaga aqidah umat Islam dari bahaya laten komunisme. Selain itu, aktifitas FAK juga setidaknya terlibat dalam aspek politik karena Isa Anshary selaku ketua FAK juga merupakan Ketua Umum Masyumi wilayah Jawa Barat. Sehingga, FAK menggunakan identitas Islam di dalam kampanye yang dilakukan Isa Anshary dan beberapa kader Masyumi yang lainnya (Anshary 1956).

Gerakan FAK mendapatkan pengaruh yang besar dari seorang Isa Anshary yang merupakan termasuk dalam fundamentalisme Islam. Oleh karena itu, FAK selalu melakukan tindakan konfrontatif apa yang dilakukan oleh PKI di dalam perpolitikan di Indonesia. Sehingga pada akhirnya, konflik sering muncul antara FAK dengan PKI, dan pada tahun 1958 FAK dibubarkan oleh Sukarno karena dianggap mengganggu jalannya pemerintahan orde lama (Suara Masjumi 1954).

Ketiga, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI merupakan gerakan yang menggunakan identitas Islam. HTI adalah bagian dari jaringan Hizbut Tahrir (HT) yang merupakan sebuah partai politik dan gerakan Islam internasional yang didirikan oleh Taqiyadun an-Nabhani di al-Quds, Palestina, pada tahun 1953 (Shobron 2014). Berdirinya HT ini kemudian bertujuan untuk membangkitkan kembali umat Islam yang dianggap mengalami keterpurukan di dalam sistem politik. Menurut pandangan HT, bahwa dengan sistem *kebilafah daulah Islamiyah* sebuah negara akan mengalami kemajuan pesat seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW pada masa silam (Hilmy 2011). Meminjam pendapat Rafiudin,

bahwa dengan tidak diterapkannya khilafah maka umat Islam mengalami tiga masalah besar, yakni kehilangan kepemimpinan umum di tengah-tengah umat Islam, tidak ditegakkannya syariat Islam secara kaffah, dan umat Islam menjadi lalai karena tidak berpartisipasi aktif di dalam medan politik yang tersedia (Rafiudin 2015).

Atas pandangannya tersebut, kemudian HT memperluas jaringannya di sebanyak 48 negara di dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, gerakan transnasional HTI masuk pada tahun 1983 dibawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi tepatnya di daerah Bogor. Setelah masuk di Indonesia, kemudian HTI menyebarkan doktrinnya terutama di kalangan akademisi kampus, yakni mahasiswa, misalnya dalam Lembaga Dakwah Kampus (LDK) kampus IPB, ITB, UGM, dan UI (Aksa 2017). Di dalam pergerakannya, HTI menggunakan dua metode, yakni dakwah dan politik. Dakwah, yakni dengan berceramah atau menuliskan majalah yang berisikan tentang urgensi syariat Islam di Indonesia. Sedangkan politik, HTI berupaya dalam memasuki partai-partai politik yang ada di Indonesia, atau sekadar memainkan isu sentral seperti pemberantasan korupsi, melemahnya rupiah, naiknya harga sembako, dan sebagainya (Karim 2016).

Eksistensi HTI di Indonesia ini kemudian menjadi perhatian besar pemerintah, karena HTI tidak jarang melakukan aksi protes berlebihan sehingga terdapat korban di dalamnya. Selain itu, HTI juga merupakan gerakan sosial yang tidak mencerminkan sebagai warga negara Indonesia yang patuh terhadap ideologi Pancasila. HTI menganggap bahwa, demokrasi dan ideologi Pancasila yang diterapkan di Indonesia merupakan produk kafir yang harus diganti dengan sistem khilafah (Mahamid 2022). Oleh karena itu, pada tahun 2017, melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), maka HTI resmi dibubarkan oleh pemerintah dan segala aktifitas yang menggunakan atribut HTI mengandung unsur pidana (BBC News 2018).

Keempat, Front Pembela Islam (FPI). FPI didirikan oleh sekelompok alim, habaib, dan muballigh pada tanggal 17 Agustus 1998 di Ciputat, Tangerang Selatan (Al Zastrou 2006). Tokoh yang paling berpengaruh di dalam FPI adalah seorang Habib bernama Muhammad Rizieq Shihab. Sesuai dengan namanya, tujuan FPI adalah untuk menjadi gerakan sosial-keagamaan yang paling terdepan di dalam membela ajaran Islam. FPI merupakan gerakan yang menggunakan identitas Islam sebagai aktifitas pergerakannya. Doktrin yang digunakan FPI adalah *amar ma'ruf nahi munkar*. Oleh karena itu, FPI selalu berupaya untuk menegakkan kebaikan dan mencegah keburukan untuk tetap ada di Indonesia (Jahroni 2004).

Permasalahan yang timbul adalah, bahwa FPI menggunakan ajaran *ablussunnah wal jama'ah* (aswaja). Fakta historis yang terjadi, klaim aswaja yang terdapat pada FPI berbeda dengan organisasi Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Di bawah doktrin amar ma'ruf dan nahi munkarnya, tidak jarang bahwa FPI bertindak secara berlebihan dalam menegakkan kebaikan dan mencegah keburukan. Di dalam implementasinya, FPI bergerak melakukan sweeping di daerah prostitusi, perjudian, dan minuman keras. Namun yang terjadi adalah, bahwa FPI sering bertindak sendiri tanpa didampingi oleh pihak yang berwenang, sehingga sweeping yang dilakukan FPI kemudian menghasilkan korban sesama manusia (Syaeudin 2014).

Kader-kader dari FPI juga seringkali melakukan aktifitas gerakannya dengan *takfir*, yakni melontarkan kata kafir kepada sesama umat Islam karena dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, aktifitas FPI juga terlibat dalam politik praktis untuk mendukung pasangan calon yang dianggapnya mendukung nilai-nilai Islam, seperti dalam pemilihan gubernur 2017 dan pemilihan presiden pada 2019, kader dan simpatisan FPI kerap kali mengeluarkan narasi kafir bagi yang mendukung pasangan calon yang melakukan penistaan agama (Ahok) (Maulana 2020). Hingga pada 30 Desember 2020,

FPI dibubarkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) enam Kementerian di Indonesia karena dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan ideologi Pancasila. Alasan selanjutnya adalah, FPI dibubarkan karena tidak terdaftar di dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang izin penyelenggaraan organisasi. Sejak dibubarkannya FPI, maka seluruh kegiatan yang menggunakan nama FPI akan dikenakan sanksi negara dan diproses secara hukum ([“Rizieq Shihab: FPI Dibubarkan Setelah Semua Syarat Terpenuhi” 2021](#)).

Berdasarkan keempat contoh yang telah disebutkan di atas, kaitan antara politik identitas dengan fakta historis di Indonesia menemukan relevansinya tersendiri, yakni politik identitas telah menunjukkan eksistensinya di dalam perjalanan panjang sejarah politik di Indonesia. Bermula pada peran ulama Jawi yang tidak hanya memberikan pemahaman agama melalui transmisi keilmuan dalam jaringan keulamaan, melainkan juga membentuk umat Islam yang mempunyai nasionalisme yang saat itu masih dalam cengkeraman Hindia Belanda. Hingga pada pasca kemerdekaan, terdapat perkembangan gerakan politik identitas Islam seperti empat gerakan di atas, yang mana gerakan politik identitas tersebut memberikan dampak yang besar pada aspek sosial dan, bahkan mengganggu kestabilan politik.

Demikian pula yang terdapat pada gerakan 212. Gerakan politik identitas di era kontemporer ini termasuk dalam gerakan yang memberikan dampak bagi aspek sosial, politik, bahkan agama di Indonesia. Menurut [Azra \(1996\)](#), bahwa politik identitas yang muncul di Indonesia setidaknya mengandung tiga hal, *pertama*, politik identitas di dalam gerakan Islam selalu gagal untuk menunjukkan eksistensinya di Indonesia. *Kedua*, politik identitas selalu membawa konflik yang berkepanjangan. *Ketiga*, politik identitas mengancam kebhinekaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan mendiskusikan tentang eksistensi gerakan 212 dan menganalisis unsur distingtif dari gerakan politik identitas yang pernah terjadi di Indonesia.

Gerakan 212: Latarbelakang Historis serta Eksistensinya di Indonesia

Nama gerakan 212 merupakan berasal dari aksi yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam Indonesia yang terjadi pada tanggal 2 Desember 2016. Gerakan yang terjadi pada 2 Desember tersebut sejatinya merupakan lanjutan dari aksi-aksi yang sebelumnya telah dilakukan. Gerakan 212 merupakan sebuah protes atau tuntutan yang dilakukan kepada pemerintah agar Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dihukum sesuai dengan prosedur hukum yang sesuai ([Argenti 2019](#)).

Gambar 1: Situasi saat gerakan 212 di Tugu Monumen Nasional



Sumber : Republika

Pada 27 September 2016, Ahok melakukan pidato di Kepulauan Seribu. Di dalam pidatonya tersebut, Ahok melontarkan kalimat yang kontroversial, berikut kutipannya:

“kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu.” (Zamzami 2016)

Ucapan Ahok tersebut kemudian diunggah melalui facebook oleh Buni Yani, sehingga video yang terjadi di Kepulauan Seribu tersebut menjadi diketahui oleh khalayak umum dan menimbulkan kemarahan bagi umat Islam. Kemarahan umat Islam merupakan respon atas Ahok yang dianggap menistakan agama Islam karena kalimat “dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51”. Dalam hal ini setidaknya ada dua hal, *pertama*, adalah asumsi umat Islam bahwa Ahok menganggap bahwa Surat Al-Maidah yang merupakan bagian dari kitab suci Al-Qur’an dianggap alat menyebarkan kebohongan. *Kedua*, adalah siapapun yang menyebarkan ajaran tentang Al-Maidah ayat 51 adalah pembohong (Mujibbudin 2018).

Respon kemarahan besar yang ditunjukkan oleh umat Islam, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2016 Ahok meminta maaf kepada umat Islam di Balai Kota, Jakarta. Upaya Ahok dalam meminta maaf tersebut tidak menyurutkan kemarahan yang terdapat di dalam umat Islam. Misalnya saja, adalah Pemuda Muhammadiyah yang ingin tetap memenjarakan Ahok. Bahkan, Ma’ruf Amin yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Oktober 2016 mengeluarkan pendapatnya, bahwa Ahok telah melakukan penodaan terhadap agama Islam. Pernyataan yang dikeluarkan oleh MUI tersebut kemudian memperkuat keadaan bahwa Ahok harus diadili dengan hukum yang berlaku. Selain itu, kemudian muncul Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) yang kemudian membuat Aksi Bela Islam pertama pada tanggal 14 Oktober 2016 (Tohari 2019).

Aksi Bela Islam pertama sebenarnya lebih kepada demo FPI kepada Ahok, hal ini disebabkan karena banyaknya kader FPI yang menjadi peserta aksi yang pertama ini dengan komando Rizieq Shihab sebagai Ketua Umum FPI, serta dibantu oleh Bachtiar Nasir, Zaitun Rasmin. Dinilai aksi yang pertama belum menghasilkan sesuatu yang diinginkan, maka kemudian aksi dilanjutkan pada tanggal 4 November dan puncaknya pada 2 Desember 2016 (Rabbani 2021).

Aksi yang dilakukan pada 2 Desember, merupakan fenomena penting bagi umat Islam di Indonesia karena peserta aksi mencapai jutaan jumlahnya, yang mana jumlah tersebut tidak pernah diduga sebelumnya. Dalam momen 212 tersebut, massa yang hadir tidak hanya berasal dari FPI, melainkan kader Muhammadiyah juga hadir yang dipimpin oleh Amin Rais. Selain itu, hadir pula seperti Abdullah Gymnastiar, Arifin Ilham, bahkan ketua umum MUI yakni Ma’ruf Amin. Bahkan, organisasi Islam seperti Persatuan Umat Islam (PUI) dan Persatuan Islam (Persis) pun mendukung gerakan 212 tersebut. Sementara itu organisasi moderat seperti NU dan Muhammadiyah secara struktural tidak menganjurkan kepada pengikutnya untuk terlibat dalam aksi 212 (Abdullah 2017).

Agenda yang dilakukan pada 212 memiliki tujuan fundamental, yakni protes terhadap pemerintah agar Ahok segera diadili dan dimasukkan ke dalam penjara. Acara protes tersebut kemudian dikemas dengan melaksanakan shalat Jumat secara berjama’ah di Monas dengan khutbah yang disampaikan oleh Rizieq Shihab dan dihadiri pula oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu, gerakan 212 tersebut memiliki tujuan pragmatis yang bersifat politis, yakni untuk memperkecil elektabilitas yang dimiliki oleh Ahok serta mendukung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di dalam Pemilihan Gubernur di awal tahun 2017 (Septiana 2020).

Tujuan fundamental dan pragmatis gerakan 212 pada akhirnya tercapai setelah

Anies-Sandi terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Ahok mendapatkan hukuman penjara selama 2 tahun. Namun, momentum gerakan 212 seolah-olah tidak ingin berlalu begitu saja bagi Rizieq Shihab dan tokoh Islam lainnya yang terlibat di dalam gerakan tersebut. Oleh karena itu, gerakan 212 kemudian berubah menjadi Persaudaraan Alumni (PA) 212 dengan Slamet Ma'arif sebagai Ketua Presidium. PA 212 pada dasarnya merupakan lanjutan dari gerakan besar yang terjadi pada 2 Desember 2016. Aktifitas yang dilakukan oleh PA 212 adalah dengan masuk ke dalam aspek ekonomi, seperti mendirikan 212 Mart yang dinilai sebagai tempat perbelanjaan syariah bagi umat Islam (Widyastuti 2022).

Selain aspek ekonomi, PA 212 kemudian juga tetap berada di medan politik, yakni mengimbau bagi simpatisan gerakan 212 agar memilih pemimpin yang mendukung terhadap nilai-nilai serta mereduksi partai politik yang dinilai memusuhi umat Islam. Maka dari itu, aktifitas dari PA 212 adalah dengan menyelenggarakan Shalat Subuh berjamaah di Monas pada setiap tanggal 2 Desember dan juga terlibat dalam politik praktis.

Pada akhir 2018, telah diumumkan bahwa calon presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi pada pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019 adalah Joko Widodo dengan Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno. Melihat momen seperti itu, maka PA 212 mengambil bagian dengan menjadi pendukung salah satu pasangan calon, yakni Prabowo-Sandiaga. Alasan PA 212 berada di belakang Prabowo-Sandi adalah terdapat partai-partai yang dianggap pro terhadap Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Gerindra. Alasan selanjutnya adalah, bahwa beberapa kader dari partai pengusung Prabowo-Sandi juga terlibat dalam gerakan 212, seperti Hidayat Nur Wahid, Mardani Ali Sera, dan Fadli Zon. Selain itu, partai-partai yang mengusung Prabowo-Sandi mayoritas juga mendukung Anies-Sandi pada pilgub 2017 lalu, sehingga PA 212 tetap berada di barisan yang sama untuk pilpres 2019 (Pratama 2021).

Politik Identitas Gerakan 212: Analisis Konflik

Analisis selanjutnya adalah dengan mengacu kepada teori konflik. Menurut Marx, suatu struktur masyarakat akan mengalami sebuah konflik jika terdapat sesuatu perasaan tertindas dari sub yang mayoritas terhadap sub yang minoritas, oleh karena itu masyarakat itu sendiri lah yang menciptakan konflik (Razak 2008). Pendapat lain melalui Dahrendorf (1986) yang memandang bahwa konflik muncul melalui hubungan antar sistem dan memberikan pengaruhnya kepada masyarakat yang tidak terikat oleh sistem. Dalam hal ini, teori konflik Marx dan Dahrendorf mampu diterapkan sebagai pisau analisis kajian tentang gerakan 212 di Indonesia.

Politik identitas, dalam hal ini Islam, merupakan sesuatu yang telah muncul di dalam kalangan umat Islam sebagai wujud protes terhadap elit pemerintahan karena umat Islam dianggap termarginalkan dengan sistem yang sedang berlangsung saat itu. Sebagaimana contoh yang telah disebutkan oleh Bahtiar Effendy (2011), ketika masih dalam era orde baru, para pemikir dan politisi Islam seolah-olah terbelenggu oleh sistem yang dibuat oleh Suharto. Maka ketika rezim orde baru berakhir, hal tersebut merupakan angin segar para aktivis Islam untuk kembali menyusun formasi politik Islam seperti masa orde lama. Oleh karena itu, ketika masuk dalam era reformasi, maka terjadi apa yang disebut sebagai "liberalisasi politik", ditandai dengan muncul berbagai partai politik serta bebasnya berbagai aktifitas umat Islam yang dinilai tersandera oleh rezim sebelumnya.

Sebagai konsekuensi liberalisasi politik di atas, maka umat Islam dapat melakukan berbagai manifesto untuk mencapai cita-cita yang diinginkan selama masih dalam koridor nilai-nilai Pancasila walaupun berbagai upaya tersebut tergolong dalam politik identitas di

Indonesia. Menurut [Anderson \(2006\)](#) sebuah identitas bagi setiap individu akan terlihat jika memiliki kesadaran bahwa dirinya sedang berada dalam ruang lingkup komunitas dan muncul melakukan usaha cacah jiwa sebagai emblem gerakan tertentu. Perspektif Anderson tersebut kemudian dapat menemukan relevansinya, bahwa ide dari berbagai individu yang diimplementasikan dalam sebuah gerakan yang berkelompok, dalam hal ini adalah gerakan 212 yang tergolong dalam politik identitas Islam.

Namun fakta historis menyebutkan bahwa, tidak jarang kemudian bahwa gerakan-gerakan sosial maupun politik yang menggunakan identitas Islam tidak terlepas dari sebuah konflik. Artinya, gerakan-gerakan yang selama ini muncul kebanyakan timbul ke permukaan masyarakat disertai dengan konflik sesudahnya. Dalam hal ini, terdapat konflik yang ditimbulkan akibat gerakan besar pada 2 Desember 2016. Berbagai konflik yang muncul setelah gerakan 212, setidaknya dapat dilihat dalam beberapa konteks.

Pertama, konflik keagamaan. Konflik keagamaan yang dimaksud adalah terjadinya polarisasi di antara umat Islam itu sendiri. Misalnya adalah dari NU dan Muhammadiyah. Ketika aksi 212 sedang berlangsung, ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yakni Said Aqil Siradj mengimbau agar kaum Nahdliyyin untuk tidak terlibat di dalam gerakan 212. Namun yang terjadi adalah, bahwa terdapat tokoh besar seperti Ma'ruf Amin yang merupakan bagian dari NU dan ketua umum MUI yang bahkan mendukung dari gerakan 212 tersebut. Di sisi lain, Muhammadiyah pun mengeluarkan sikap yang sama, bahwa Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melarang untuk pengikut Muhammadiyah terlibat di dalam gerakan 212. Meskipun demikian pada saat bersamaan Amin Rais yang dahulu juga pernah menjadi ketua umum Muhammadiyah, membawa massa Muhammadiyah dari gedung PP Muhammadiyah menuju Monas ([Jubba dkk. 2020](#)).

Berdasarkan hal tersebut di atas, meminjam istilah [Najib Burhani \(2016\)](#), bahwa terdapat fragmentasi atau terpecahnya otoritas keagamaan di dalam Islam. Hal demikian disebutkan karena organisasi moderat seperti NU dan Muhammadiyah sudah mengimbau agar pengikutnya tidak terlibat di dalam gerakan 212, namun imbauan tersebut seolah tidak diindahkan dan tetap bergabung dengan gerakan 212 yang notabene mayoritas merupakan kader FPI yang dipimpin oleh Rizieq Shihab. Terlebih lagi, gerakan 212 tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang membuat gerakan 212 seolah menjadi terlegitimasi, padahal di sisi lain Ahok telah meminta maaf kepada umat Islam.

Kedua, konflik politik. Pasca peristiwa 2 Desember 2016, gerakan 212 yang kemudian menjadi PA 212 terlibat ke dalam politik praktis di Indonesia. PA 212 merupakan sebuah kelompok politik identitas yang menggunakan Islam sebagai dasar pergerakannya. PA 212 menjaga momentum memori kolektif yang dimiliki umat Islam pada peristiwa 212 dengan menjadikannya sebagai media untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam pilgub 2017 dan pilpres 2019 ([Pradipta 2018](#)). Hasilnya adalah, di dalam kontestasi tersebut PA 212 berada di barisan yang diklaimnya sebagai partai dan calon pemimpin yang Islami, sehingga asumsi untuk memilih pasangan calon yang tidak diusung oleh PA 212 maka dinilai mendukung penistaan agama, bahkan dianggap kafir. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari peran Rizieq Shihab dan FPI yang begitu besar di belakang PA 212, sehingga sesuatu yang dihasilkan cenderung radikal ([Syaeudin 2014](#)).

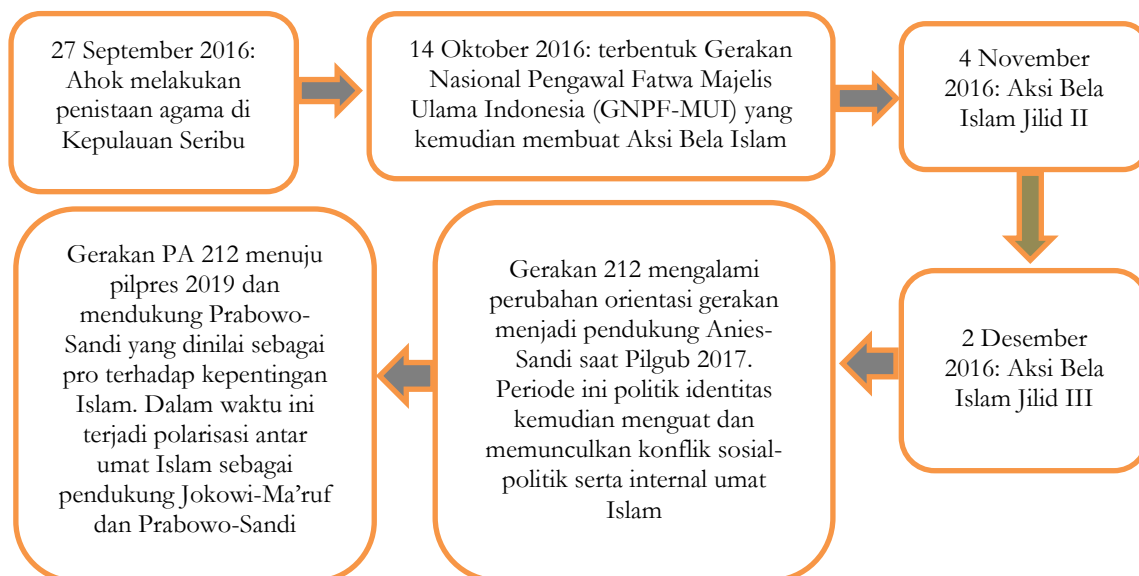
Ketiga, konflik ideologi. Politik identitas yang terdapat pada gerakan 212 kemudian membuka celah konflik yang baru di dalam sosio-keagamaan dan politik di Indonesia pada era kontemporer. Konflik ideologi yang dimaksud adalah, politik identitas pada gerakan 212 merupakan wujud perseteruan antara non-Muslim dan etnis tionghoa (Ahok) berhadapan dengan Islam fundamental (FPI, PUI, dan sebagainya). Konflik ideologi yang muncul dalam politik identitas gerakan 212 tentu saja tidak lepas dari pengaruh dari HTI dan FPI yang merupakan dua organisasi yang menginginkan Indonesia menggunakan syariat Islam

secara *kaffah*. Oleh karena itu, organisasi moderat seperti NU dan Muhammadiyah memilih sikap untuk berjarak dengan politik identitas yang dilakukan oleh gerakan 212 (Argenti 2019). Dengan terdapatnya dua pandangan politik Islam kontemporer; moderat: NU dan Muhammadiyah, fundamental: GNPf MUI, FPI, PUI, Persis, maka terjadi disintegrasi pula pada umat Islam di Indonesia sehingga terjadi perbedaan pendapat tentang Islam Nasionalisme dan Islam Radikal. Dengan kata lain bahwa, gerakan 212 seolah-olah mengantarkan kepada perdebatan ideologi yang terjadi antara Nasionalis dengan Islam pada pasca kemerdekaan yang mengakibatkan ancaman bagi pluralisme yang sudah lama dibangun di Indonesia (Fanany 2020).

Berdasarkan pemaparan di atas, politik identitas yang menggunakan Islam sebagai spirit pergerakan bagi sebuah gerakan, menurut Machasin (2011), merupakan sesuatu yang wajar di dalam demokrasi. Hal yang terpenting adalah kesadaran bagi umat Islam yang berada di dalam struktur pemerintahan untuk membendung arus radikalisme yang ada pada gerakan politik identitas yang mengatasnamakan agama. Karena terbukti bahwa, politik identitas yang sempat menunjukkan eksistensinya seperti DI/TII, FAK, HTI, maupun FPI, gerakan-gerakan tersebut tidak mencerminkan pada semangat persatuan yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 dan ideologi Pancasila. Urgensi dari penarikan historis gerakan 212 terhadap gerakan DI/TII, FAK, HTI maupun FPI adalah, tidak menutup kemungkinan bahwa gerakan serupa akan muncul kembali ke permukaan dengan menggunakan gerakan sosial-keagamaan sebagai identitas politik dan kemudian timbul konflik berkepanjangan yang mengakibatkan polarisasi dalam aspek keagamaan, sosial dan juga politik (Ubaedillah 2013).

Dalam hal ini, gerakan 212 yang pada mulanya merupakan gerakan protes terhadap Ahok yang melakukan penistaan agama, kemudian orientasi tersebut berubah menjadi gerakan politik identitas yang tidak jarang menimbulkan konflik di Indonesia. Dengan demikian, umat Islam seyogianya memperhatikan kemaslahatan umat setidaknya dengan menjadikan organisasi Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah sebagai *role model* di dalam aspek sosial-keagamaan bahkan politik (Ma'arif 2012). Dengan demikian, secara ringkas alur peristiwa dan konflik yang terjadi dalam gerakan 212 sebagai berikut:

Gambar 2: Alur peristiwa dan konflik dalam gerakan 212



PENUTUP

Politik identitas merupakan diskursus yang selalu menjadi perhatian bagi para sarjana, terkhusus sarjana Muslim di Indonesia. Pasalnya, melalui kacamata historis pasca Indonesia merdeka hingga era kontemporer saat ini, gerakan politik identitas selalu muncul dengan membawa dampak yang berkelanjutan. Gerakan politik identitas yang tersebut, misalnya adalah gerakan DI/TII, gerakan Front Anti Komunis, HTI maupun FPI. Berbagai gerakan yang muncul dengan menggunakan identitas Islam sebagai spirit perjuangan tersebut kemudian tidak jarang harus berhadapan dengan konflik yang mengganggu stabilitas aspek sosial maupun politik di Indonesia, pun demikian yang terjadi pada gerakan 212.

Penelitian ini menunjukkan, gerakan 212 merupakan gambaran dari Islam politik dan fenomena kontemporer yang termasuk dalam gerakan politik identitas. Temuan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa, terdapat perubahan orientasi gerakan 212 yang bermula merupakan gerakan protes terhadap Ahok yang melakukan penistaan agama, menjadi gerakan politik identitas Islam dengan mendukung salah satu pasangan calon yang dianggap pro terhadap kepentingan Islam pada Pilgub 2017 dan Pemilu 2019, yakni Anies-Sandi dan Prabowo-Sandi. Berubahnya orientasi gerakan 212 menggunakan identitas Islam dalam berpolitik ini kemudian menghasilkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Berbagai konflik tersebut adalah konflik internal pada umat Islam, konflik politik, maupun konflik ideologis. Di antara berbagai konflik yang ada, polarisasi pada umat Islam tidak dapat terhindarkan. Polarisasi yang muncul dalam umat Islam, seolah-olah menjadi ajang pemilihan hidup dan mati saat Pilgub 2017 maupun Pemilu 2019. Atau dengan kata lain, dampak dari politik identitas gerakan 212 ini seakan-akan bagi yang tidak memilih pasangan calon yang diusung gerakan 212 maka dianggap memilih pasangan calon yang kafir dan tidak pro terhadap kepentingan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Assyari. 2017. "Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212: Antara Politik Identitas dan Ijtihad Politik Alternatif." *Jurnal An-Nida Pemikiran Islam* Vol. 41, No.2: 201–12.
- Abdurrahman, Dudung. 2019. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Aksa. 2017. "Gerakan Islam Transnasional: Sebuah Nomenklatur, Sejarah dan Pengaruhnya di Indonesia." *YUPA: Historical Studies Journal* Vol. 1, No.1: 2.
- Al Zastrou. 2006. *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*. Yogyakarta: LKiS.
- Anderson, Benedict. 2006. *Imagined Communities*. Revisions. London: Verso.
- Anshary, Muhammad Isa, dkk. 1956. *Bahaja Merah di Indonesia*. Bandung: Front Anti Komunis.
- Argenti, Gili. 2019. "Islam Politik di Indonesia: Transformasi Gerakan Sosial Aksi Bela Islam 212 dari Gerakan Demonstrasi ke Gerakan Kelembagaan Sosial, Politik, dan Ekonomi." *Jurnal Unsika* Vol. 1 (Januari): 1–23.
- Azra, Azyumardi. 1996. *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina.
- . 2016. *Jaringan Ulama Timur Tengah Abad XVII-XVIII*. Perennial. Jakarta: Kencana.
- Bachtiar, Tiar Anwar. 2018. *JAS MEWAH: Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah & Dakwah*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- . 2021. *Politik Islam di Indonesia: Wacana Tentang Khilafah, Syariat Islam, Demokrasi dan Dinamikanya dalam Sejarah Islam*. Bandung: Persis Press.
- Bakar, A. 2018. "Konsepsi Ketatanegaraan Kahar Muzakkar." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Pandangan Islam* Vol. 8, No.1 (April): 50–77.
- BBC News*. 2018. "HTI Dinyatakan Ormas Terlarang," Mei 2018.
- Budiarjo, Miriam. 2015. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Kompas Gramedia Utama.
- Burhani, Ahmad Najib. 2016. "Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan." *Jurnal Ma'arif* Vol. 11, No.2: 15–29.
- Burhanudin, Jajat. 2012. *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Jakarta: Mizan.
- Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik Masyarakat dalam Industri: Sebuah Analisa Kritik*. Terjemahan oleh Ali Mandan. Jakarta: Rajawali Press.
- Effendy, Bachtiar. 2011. *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Democraton Project.
- Fanany, Ismet and Rebecca Fanany. 2020. "Religion and Populism: The Aksi 212 Movement in Indonesia." *Bristol University Press*, 245–58. <https://doi.org/10.51952/9781447353867.ch014>.
- Fauzan, Pepen Irpan. 2019. *Negara Pancasila vis-à-vis Negara Islam; Pemikiran Politik M. Natsir dan M. Isa Ansbary (1945-1960)*. Garut: STAIPI Garut Press.
- Gaffar, Afan. 1993. "Islam dan Politik dalam Era Orde Baru." *Journal UNISLA* No. 17: 69–79.
- Garadian, Endi Aulia. 2017. "Membaca Populisme Islam Model Baru." *Studia Islamika* Vol. 24, No.2: 379–93.
- Hakim, Lukmanul. 2020. "Analisis Historiografi Terhadap Pemikiran Azyumardi Azra dalam Jaringan Ulama." *Jurnal Lektur Keagamaan* Vol. 18, No. 2: 517–46.
- Hariato. 2022. "Perlawanan DI/TII Terhadap Negara (Studi Terhadap Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan)." *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* Vol. 10, No.1 (Januari): 101–10.

- Hilmy, Masdar. 2011. "Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)." *Jurnal Islamica* Vol. 6, No.1 (September): 1–13.
- Jabali, Fu'ad. 2010. *Sababat Nabi: Siapa, Ke Mana, dan Bagaimana?* Bandung: Mizan.
- Jahroni, Jajang. 2004. *Gerakan Radikal Salafi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Jubba, Hasse, Tawakkal Baharuddin, Mustaqim Pabbajah, dan Zuly Qodir. 2020. "Dominasi Internet Di Ruang Publik: Studi Terhadap Penyebaran Wacana Gerakan Bela Islam 212 Di Indonesia." *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 15 (1): 1–13. <https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.1631>.
- Kamsi. 2013. "Citra Gerakan Politik Islam dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan Bangsa Indonesia (Studi Era Pra Kemerdekaan sampai dengan Era Orde Baru)." *Jurnal Millah* Vol. 13, No.1: 109–53.
- Karim, Syahrir. 2016. "Islam Ideologis dan Gerakan Politik Islam Kontemporer." *Jurnal Politik Profetik* Vol. 4, No.2: 130–45.
- Kuntowijoyo. 2008. *Penjelasan Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Laffan, Michael Francis. 2003. *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma Below the Wind*. London and New York: Routledge and Curzon.
- Latif, Yudi. 2018. *Wawasan Pancasila*. Jakarta: Mizan.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 2012. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Edisi Digital. Jakarta: Democratisation Project.
- Machasin. 2011. *Islam Dinamis Islam Harmonis: Lokalitas, Pluralisme, Terorisme*. Yogyakarta: LKiS.
- Madinier, Remy. 2013. *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*. Bandung: Mizan.
- Madjid, Dien dan Johan Wahyudi. 2014. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mahamid, Muhammad Nginwanun Likulil. 2022. "Gerakan Ideologi Islam Transnasional di Indonesia dalam Film JKDN Karya Nicko Pandawa." *Jurnal Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas* Vol. 7, No.1 (83–109): 83–10.
- Maulana, Ilham Fariq. 2020. "Political Propaganda, Mass Mobilization, and Narrative of Habib Rizieq Shihab in The Akbar 212 Reunion." *al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi* Vol. 5, No.2 (Juli): 252–94.
- Mubarak, M. Zaki. 2015. "Dari NII ke ISIS: Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer." *Episteme* Vol. 10, No.1 (Juli): 78–98.
- Muhajir, Aziz. 2016. "Politik Daud Beureueh dalam Gerakan DI/TII Aceh." *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora* Vol. 4, No.1 (Juni): 1–18.
- Mujibbudin, M. 2018. "Kontruksi Media dalam Gerakan Islam Populis 212." *Journal Sosiologi Agama* Vol. 12, No.2 (Juli): 261–82.
- Nugroho, Anjar. 2013. "Wacana Islam dan Negara Era Pra-Kemerdekaan: Pergulatan Ideologis Kelompok Islam dan Nasionalis Sekuler." *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman al-Afkaruna*, 129–47. <https://doi.org/10.181196>.
- Pradipta, Abidatu Lintang et. al. 2018. "Analisis Bingkai Pemberitaan Aksi Bela Islam 2 Desember 2016 (Aksi 212) di Media Massa BBC (Indonesia) dan Republika." *Informasi: Kajian Ilmu Komunikasi* Vol. 48, No. 1: 109–24.
- Pratama, Dea Bhakti. 2021. "Populisme Islam dalam Gerakan 212 (Studi Kasus: Lima Organisasi Keagamaan)." *Saskara Indonesian of Journal Society Studies* Vol. 1, No.1 (Juni): 1–26.
- Putra, Okrisal Eka. 2008. "Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Baru." *Jurnal Dakwah* Vol.12, No.2 (Juli): 185–201.

- Rabbani, Burhanudin, Nila Sastrawati. 2021. "Kebangkitan Islam dalam Sistem Politik di Indonesia (Studi Analisis Dampak Gerakan 212)." *Jurnal Siyasatuna* Vol. 2, No.1 (Januari): 42–53.
- Rafiudin, Muhammad. 2015. "Mengenal Hizbut Tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU)." *Jurnal Islamuna* Vol. 2, No.1 (Juli): 29–55.
- Razak, Yusron. 2008. *Sosiologi Sebuah Pengantar*. Ciputat: Lembaga Sosiologi Agama.
- Renhoard, John Musa. 2019. "Politik Identitas Masa Orde Baru di Indonesia Memasuki Masa Reformasi." *Journal Societas Dei* Vol. 6, No.1 (April): 115–31.
- "Rizieq Shihab: FPI Dibubarkan Setelah Semua Syarat Terpenuhi." 2021. CNN.
- Sanusi, Anwar dkk. 2022. "Hijrah and Islamic Movement in Indonesia: Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo's Perspective." *Journal al-Turats* Vol.28, No.1: 19–30.
- Septiana, Elis Nugraha et. al. 2020. "Aksi 212 dan Kemenangan Anies-Sandi pada Pemilihan Gubernur Jakarta 2017." *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 10, No. 2: 211–30.
- Shobron, Sudarno. 2014. "Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia." *Jurnal Profetika* Vol. 15, No.1 (Juni): 44–62.
- Siregar, Parlindungan. 2021. "The History of Moslem Intellectuals: A Case Study at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta." *Al-Turas* Vol. 27, No.2 (Juli): 329–44.
- Suara Masjumi. 1954. "Aidit Mengkhawatiri Front Ant Komunis," Oktober 1954.
- . 20 September 1954. "Masjumi Wilajah Jawa Barat Bentuk Front Anti Komunis," 20 September 1954.
- Suhelmi, Ahmad. 2014. *Polemik Negara Islam Soekarno vs Natsir*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 1995. *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Syaefudin, Machmud. 2014. "Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI)." *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 34, No. 2 (Juli): 259–75.
- Tohari, Chamim. 2019. "Konsep Ijma' dalam Ushul Fiqih dan Klaim Gerakan Islam 212." *Aqlam: Jurnal of Islam and Plurality* Vol. 4, No.2: 150–63.
- Ubaedillah, Abdul Rozak. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education: Demokrasi, Hak Azazi Manusia dan Masyarakat Madani*. Ciputat: ICCE.
- Widianingsih, Miati et. al. 2018. "Agama dan Sains: Telaah Kritis Tafsir Ayat Berbasis Angka (Numerik) dalam Gerakan 212." *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* Vol. 1 (September): 139–43.
- Widyastuti, Nurprapti Wahyu et. al. 2022. "Pemaknaan Aksi Super Damai 212 dan Gerakan Kebangkitan Ekonomi Umat Islam di Indonesia." *Jurnal Komunika* Vol. 5, No. 1: 91–106.
- Zamzami, Faisal. 2016. "Ahli Bahasa: Ucapan Ahok Merupakan Penistaan Agama." *Serambi News*, 16 November 2016.